



# RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 18  
MASA SIDANG II  
TAHUN 2019

TENTANG

PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP  
RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN  
ANGGARAN 2018

DEMAK, 25 JUNI 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK  
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK  
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
RISALAH**

- Jenis Rapat : Paripurna  
Rapat Ke : 18 (delapan belas)  
Masa Sidang : II  
Tahun : 2019  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari / Tanggal : Selasa / 25 Juni  
Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak  
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
- Pimpinan Rapat : H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)  
Didampingi :
1. H.M. Natsir  
(Bupati Demak)
  2. Drs. Djoko Santoso  
(Wakil Bupati Demak)
  3. H. Nuryono Prasetyo, SE.  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
  4. H. Muntohar, SH.  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
- Acara : PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RAPERDA TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELASANAAN APBD KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2018
- Pembawa Acara : Siswati Tri Pujiastuti, S.S.  
Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**  
26 anggota dari 50 anggota  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK**
1. dr. Singgih Setiono, MMR.  
(Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)
  2. Staf Ahli Bupati Demak
  3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
  4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak
- FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK**
1. Komandan Kodim Demak
  2. Kepala Polres Demak
  3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
  4. Ketua Pengadilan Negeri Demak
- SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK**
1. Drs. Trisno Eddie Djatmiko, MM.  
(Sekretaris DPRD)
  2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM  
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

**RAPAT PARIPURNA KE-18  
MASA SIDANG II (DUA) TAHUN 2019  
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PANDANGAN UMUM FRAKSI-  
FRAKSI TERHADAP RAPERDA TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD  
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2018**

Demak, Selasa tanggal 25 Juni 2019

**PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :**

Assalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh;

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Para Camat Se-Wilayah Kabupaten Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna hari ini, marilah Kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang II (dua) tahun 2019 DPRD Kabupaten Demak pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kurang suatu apapun, Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir, Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 1 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor

1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan : **“Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD...”**

Kami informasikan sesuai Daftar Presensi bahwa anggota DPRD yang telah hadir sebanyak 26....orang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrohmannirrohiim rapat Paripurna Ke-18 Masa Sidang II (dua) tahun 2019 dengan acara **Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018**, Pada hari ini Selasa, tanggal 25 Juni 2019 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...Dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Setelah diserahkannya Raperda oleh Bupati Demak kepada DPRD Kabupaten Demak pada tanggal 19 Juni 2019 yang lalu, maka sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam Surat Keputusan Badan Musyawarah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tahun 2019, pada hari ini Selasa, tanggal 25 Juni 2019 merupakan agenda Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018.

Untuk mengetahui sejauh mana pandangan dan pembahasan fraksi-fraksi, marilah kita dengarkan bersama beberapa hal yang perlu mendapatkan jawaban dan penjelasan dari Saudara Bupati Demak berkaitan dengan Raperda dimaksud yang akan disampaikan oleh fraksi-fraksi.

Kesempatan **Pertama** kami berikan kepada Juru Bicara Fraksi PKB untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PKB (.....)**: H. Pansidi, ST.MT.

*Membacakan Pandangan Umum Fraksi PKB (terlampir)*

**PIMPINAN RAPAT :**

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi PKB yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan Kedua kepada Juru Bicara Fraksi GOLKAR untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

**PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR (.....)**: H. Sutrisno.

*Membacakan Pandangan Umum Fraksi Golkar (terlampir).*

**PIMPINAN RAPAT :**

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi Golkar yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Selanjutnya pada Kesempatan **Ketiga** kepada Juru Bicara Fraksi Gerindra untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

**PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA (.....)**: H. Muhi Kholik S.Ag.

*Membacakan Pandangan umum Fraksi Gerindra (terlampir)*

**PIMPINAN RAPAT :**

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi Gerindra atas penyampaian Pandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan **Keempat** kepada Juru Bicara Fraksi PDIP untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PDIP (.....)**: Tatich Sulistyani.

*Membacakan Pandangan Umum Fraksi PDIP (terlampir)*

**PIMPINAN RAPAT :**

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi PDIP atas penyampaian Pandangan Umum Fraksinya.

**Kelima** kepada Juru Bicara Fraksi PPP untuk menyampaikan Pandangan umum Fraksinya, dipersilakan.

*H. Rozi Khan Anwar, SH*

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PPP (.....):**

*Membacakan Pandangan Umum Fraksi PPP (terlampir)*

**PIMPINAN RAPAT :**

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi PPP atas Pandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan **Keenam** kami berikan kepada Juru Bicara Fraksi PKS untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

*H. A. MUDHOFAR, SE*

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PKS (.....):**

*Membacakan Pandangan Umum Fraksi PKS (terlampir).*

**PIMPINAN RAPAT :**

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi PKS atas penyampaian Pandangan Umum Fraksinya.

**Ketujuh** Juru Bicara Fraksi Amanat Demokrasi untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

**PANDANGAN UMUM FRAKSI AMANAT DEMOKRASI (.....):**

*H. FARODLI, S. Pd. - I*  
*Membacakan Pandangan Umum Fraksi Amanat Demokrasi (terlampir)*

**PIMPINAN RAPAT :**

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara Fraksi Amanat Demokrasi yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

**PIMPINAN RAPAT :**

Demikianlah tadi ketujuh Fraksi DPRD Kabupaten Demak telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya yang berupa pendapat, saran, masukan serta pertanyaan yang perlu

mendapatkan jawaban dan penjelasan dari Bupati Demak dan semoga dapat menjadi sumbang-saran dan pemikiran yang bermanfaat guna bahan kajian oleh Bupati Demak terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Raperda yang dimaksud.

Selanjutnya DPRD mengharapkan kepada Yth. Saudara Bupati Demak untuk dapat memberikan jawaban dan tanggapan atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna hari ini. Sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, Rapat Paripurna dengan acara Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018, Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu 26 Juni 2019.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah tadi rangkaian acara rapat Paripurna DPRD pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang

telah dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya rapat, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamiin Rapat Paripurna Ke-18 Masa Sidang II (dua) Tahun 2019 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 kami nyatakan ditutup.

..... **Dok....dok....dok.....**

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahu muwafiq illa aqwa mithariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, Selasa 25 Juni 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**

---

**PIMPINAN RAPAT**



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516

Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : [dprd@demakkab.go.id](mailto:dprd@demakkab.go.id)

## DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2019

HARI : SELASA  
TANGGAL : 25 JUNI 2019  
PUKUL : 13.00 WIB S/D SELESAI  
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK  
ACARA : RAPAT PARIPURNA PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RAPERDA  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN  
DEMAK TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4
1	H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH.	1	
2	H. NURYONO PRASETYO, SE.	2	
3	H. MUNTOHAR.	3	
4	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	4	
5	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I.	5	
6	KASTAMAH.	6	
7	H. ULIN NUHA, S.Pd.I.	7	
8	PARSIDI, ST, MT.	8	
9	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.Pd.I.	9	
10	NUR FADLAN, S.Ag.	10	
11	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd.	11	
12	H. GHOZALI, S.Pd.I.	12	
13	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	13	
14	ROBERT FRENDY KURNIAWAN.	14	
15	YUDO ASTIKO, S.Pd., MM.	15	
16	SUNARI, SH.	16	
17	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom.	17	
18	NUR WAHID, SH.I.	18	
19	H. SANIPAN.	19	
20	H. SUTRISNO	20	
21	H. ALI SUBHAN, S.Ag.	21	
22	H. MU'THI KHOLIL, A.Md.	22	
23	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag.	23	
24	H. MARWAN.	24	

NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4
25	AHMAD MANSUR, SE.	25	
26	H. DANANG SAPUTRO, SH.	26	
27	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	27	
28	FAOZAN.	28	
29	H. SUGIHARNO, SP.	29	
30	KHOERON, M.Pd.I.	30	
31	H. SONHAJI, SH.	31	
32	H. SUDARNO, S.Sos.	32	
33	H. ARIFIN, S.Pd.I.	33	
34	H. ABU SAID, S.Pd.I.	34	
35	LATIFAH.	35	
36	H. SABIQ HAMBALI	36	
37	H. ROZIKHAN ANWAR, SH.	37	
38	H. AHMAD MUDHOFAR, SE.	38	
39	KAMZAWI, S.Ag.	39	
40	GUNAWAN.	40	
41	MUHAMMAD YASIN.	41	
42	IBRAHIM SUYUTI, SH.	42	
43	H. NGASPAN, A.Md.	43	
44	FATKHAN, SH.	44	
45	Dra. SUSI ALIFAH.	45	
46	H. FARODLI, S.Pd.I.	46	
47	AGUS HARYONO, S.Sos.	47	
48	APRILLIA RAHMAWATI, S.Pd.	48	
49	MUHAMMAD SAID	49	
50	ZAMRONI, S.Sos	50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

  
PIMPINAN RAPAT



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480

Website : [dprd.demakkab.go.id](http://dprd.demakkab.go.id) e-mail : [dprd.demakkab@gmail.com](mailto:dprd.demakkab@gmail.com)

Demak, 24 Juni 2019

Nomor : 005/0473

Kepada Yth. :

Sifat : -

Lampiran : -

Perihal : Undangan

Di -

DEMAK

Diberitahukan dengan hormat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 25 Juni 2019

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

Acara : Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018

Pakaian : P.S.H ( Pakaian Sipil Harian )

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
KETUA,

DEMAK  
H. NURUL MUTTAQIN, SH.I,MH

Tembusan Yth.:

1. Bupati Demak;

2. Arsip



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
- b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; .
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;

7. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
KESATU

:  
: Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. Rapat Panitia Khusus A, B, C dan D : Selasa s/d Sabtu  
DPRD Kabupaten Demak membahas 11 Juni s/d 29  
4 (empat) Raperda Juni 2019
  
2. a. Rapat Paripurna Penyerahan : Rabu  
Raperda Pertanggungjawaban 19 Juni 2019  
Pelaksanaan APBD Kabupaten (Pukul 09.00)  
Demak Tahun Anggaran 2018
  
- b. Halal Bi Halal Pimpinan dan Anggota  
    DPRD Kabupaten Demak.
  
3. Rapat Fraksi – fraksi membahas LPP : Senin  
APBD Kabupaten Demak Tahun 24 Juni 2019  
Anggaran 2018 (Pukul 09.00)
  
4. Rapat Paripurna Pemandangan Umum : Selasa  
Fraksi – fraksi terhadap LPP APBD 25 Juni 2019  
Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 (Pukul 13.00)
  
5. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas : Rabu  
Pemandangan Umum Fraksi – fraksi 26 Juni 2019  
terhadap LPP APBD Kabupaten demak Pukul 09.00  
Tahun Anggaran 2018
  
6. Fasilitasi 4 (empat) Raperda DPRD : Senin  
Kabupaten Demak ke Biro Hukum Provinsi 1 Juli 2019  
Jawa Tengah. :
  
- A. Raperda tentang Perlindungan Anak;
- B. Raperda tentang Penyelenggaraan  
    Perpustakaan;
- C. Raperda tentang Penanggulangan  
    Kemiskinan di Kabupaten Demak;
- D. Raperda tentang Cagar Budaya.

7. Rapat Panitia Khusus B DPRD Kabupaten Demak membahas LPP APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 : Senin s/d Rabu 8 s/d 17 Juli 2019
8. a. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Pansus A, B, C dan D membahas 4 (empat) Raperda. : Kamis 18 Juli 2019 Pukul 13.00
- b. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus B DPRD Kabupaten Demak membahas LPP APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018.
9. a. Rapat Paripurna Persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Demak terhadap 4 (empat) Raperda Kabupaten Demak. : Jumat 19 Juli 2019 Pukul : 13.00
10. b. Rapat Paripurna Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018
11. Evaluasi Gubernur atas Raperda LPP APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 : Senin 22 Juli 2019

- KEDUA : Kunjungan Kerja Panitia Khusus A, B, C dan D ke Luar Provinsi tanggal 12 s/d 15 Juni 2019 dan 19 s/d 22 Juni 2019
- KETIGA : Workshop pendalaman materi 5 (Lima) Raperda Panitia Khusus A, B, C dan D DPRD Kab. Demak tanggal 26 s/d 28 Juni 2019 :  
 E. Raperda tentang Perlindungan Anak,  
 F. Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018,  
 G. Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Demak,  
 H. Raperda tentang Cagar Budaya
- KEEMPAT : Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak 2 s/d 5 Juli 2019
- KELIMA : Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Kab. Demak ke Luar Provinsi tanggal 8 s/d 17 Juli 2019

KEENAM

: Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal 11 Juni 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

WAKIL KETUA,



H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E



**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)  
DPRD KABUPATEN DEMAK  
TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Oleh :  
Danang Saputro, SH

Disampaikan dalam Rapat Paripurna  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Demak  
Selasa , 25 Juni 2019

**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)  
DPRD KABUPATEN DEMAK  
TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Oleh :  
Danang Saputro, SH

Disampaikan Dalam Rapat Paripurna  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Demak,  
Selasa , 25 Juni 2019

*Assalamualaikum Wr. Wb.*  
Salam Indonesia Raya !

Yang terhormat, saudara Bupati dan Saudara Wakil Bupati Demak

Yang kami hormati, saudara pimpinan beserta anggota DPRD  
Kabupaten Demak

Yang kami hormati Forkompinda dan Ketua Pengadilan Negeri  
Kabupaten Demak

Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD  
Kabupaten Demak

Yang kami hormati para Staf Ahli dan Asisten Sekretaris Daerah

Yang kami hormati Kepala /Dinas/Badan/Kantor/ Instansi/Bagian  
dan Camat se- Kabupaten Demak

Yang kami hormati para wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita semua tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah  
SWT , karena hanya rahmat , taufiq dan kasih sayang-Nya yang  
diberikan kepada kita semua , pada hari ini Selasa , 25 Juni 2019 kita

bisa bersana-sama ditempat ini dapat menjalankan amanat rakyat mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan agenda pemandangan umum fraksi - fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 yang telah disampaikan saudara bupati beberapa hari lalu.

Selanjutnya sholawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW , marilah senantiasa kita kumandangkan tiada henti disepanjang waktu . Karena beliau adalah satu-satunya hamba Allah SWT yang dapat memberikan syafaat, pembelaan dan pertolongan kepada kita semua pada saat-saat yang paling sulit kelak di hari pembalasan, pada saat kita semua mempertanggungjawabkan atas segala amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini.

**Saudara bupati, pimpinan ,anggota dewan dan hadirin yang berbahagia.**

Melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak pada hari ini perkenankan Fraksi Gerindra mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dewan yang telah memberikan alokasi waktu kepada fraksi kami untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap LPP APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018.

Namun sebelumnya melalui forum yang mulia ini perkenankan fraksi Gerindra mengucapkan selamat Idul Fitri 1440 H , mohon maaf lahir dan batin kepada umat Islam yang baru saja merayakan hari besar dan hari kemenangan setelah melewati masa ujian menunaikan puasa ramadlan, semoga kita semua menjadi orang-orang yang benar-

benar muttaqin dan diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk saling memaafkan sehingga kita kembali menjadi manusia yang fitri, dan semoga pula kita semua bisa berjumpa kembali bukan ramadhan tahun depan, Aamiin.

Kepada seluruh warga masyarakat dan komunitas pendidikan di kabupaten Demak, fraksi kami mengucapkan selamat memasuki tahun ajaran / akademik baru 2019/2020 , semoga di awal masa pendidikan dan pembelajaran di berbagai tingkatan ini dapat memulainya dengan semangat baru pula. Capaian yang diraih tahun 2018/2019 dapat ditingkatkan pada era 2019/2020 yang sebentar lagi akan kita masuki dan lalui bersama-sama.Amiin.

Saudara bupati, pimpinan ,anggota dewan dan hadirin yang berbahagia.

Agenda penyampaian LPP APBD oleh bupati di depan rapat paripurna dewan merupakan amanat konstitusi yang mengacu pada sejumlah regulasi yang mewajibkan kepala daerah untuk menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selain itu sebelumnya pula harus melalui tahapan pemeriksaan oleh lembaga tinggi negara, yakni Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ). Sebagaimana saudara bupati sampaikan beberapa waktu lalu bahwa LPP APBD Kabupaten Demak tahun 2018 setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ). Atas keberhasilan meraih predikat WTP itu fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Demak mengucapkan "Selamat"

dengan teriring doa semoga prestasi ini bisa terus ditingkatkan lagi di masa-masa mendatang.

Dengan keberhasilan meraih predikat WTP itu , fraksi kami mengingatkan bahwa prestasi ini mengandung konsekuensi yang tidak ringan. Karena dimasa-masa mendatang tentu prestasi itu harus dapat kembali terulang. Hal ini menjadi tantangan yang tidak ringan. Beban untuk mempertahankan prestasi yang sudah dicapai dengan bagus di masa-masa berikutnya tentu tidaklah ringan dan mudah, karena itu saudara bupati bersama jajarannya harus bekerja lebih serius dan keras lagi.

Meski LPP APBD Kabupaten Demak tahun 2018 itu telah meraih predikat opini WTP dari BPK , namun terdapat sejumlah catatan kritis fraksi kami atas kinerja saudara bupati sebagai berikut :

1. Realisasi pendapatan asli daerah ( PAD ) memang melampaui target yang dicanangkan hingga mencapai 102,19% disatu sisi memang menggembirakan, namun menurut kami penentuan target PAD perlu dicermati dan didalami lebih intens lagi, karena jang-jangan target yang dicanangkan sebelumnya terlalu rendah. Sehingga ke depan penentuan target harus diawali dengan perencanaan yang matang , mendalam dan kajian potensi pendapatan yang lebih serius lagi. Terlebih jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya , tahun 2017 kenaikannya menyentuh angka 104 % dari yang ditargetkan. Ini berarti capaian tahun 2018 mengalami penurunan.

Terkait dengan upaya perolehan pendapatan Fraksi Gerindra memperoleh temuan berbagai potensi di sejumlah wilayah

kabupaten Demak yang kalau mendapat sentuhan motivasi, stimulus dan kepedulian dari pengambil kebijakan akan dapat memunculkan nilai lebih yang pada akhirnya dapat mendorong perolehan atau pendapatan daerah. Namun hal ini belum disentuh sama sekali.

2. Temuan potensi yang memiliki nilai produktif namun belum dimaksimalkan itu diantaranya :
  - a. Pasar - pasar yang berada dibawah pengelolaan Pemkab Demak , termasuk pasar Bintoro yang menjadi pasar sentral seharusnya bisa menjadi lokomotif perekonomian rakyat . Untuk mewujudkan itu maka terciptanya kondisi pasar yang tertib, nyaman bagi para penjual dan pembeli , aman dan tertib menjadi syarat utama yang tidak bisa ditawar. Namun kondisi itu semakin jauh dari kenyataan , karena itu kami berharap agar saudara bupati mengambil langkah-langkah cepat untuk menyelesaikan problem itu.
  - b. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang dalam beberapa tahun terakhir ini muncul dan tumbuh di beberapa kawasan di Demak semestinya jangan digusur dengan mengatasnamakan demi ketertiban dan keindahan saja, tetapi harus dicarikan solusi untuk kelangsungan usahanya. Sektor ini telah terbukti mampu menjadi kanal alamiah dalam menjawab problem pengangguran, karena itu kami ingatkan agar saudara bupati dengan dukungan fasilitas yang ada dalam waktu cepat mengubah problem sosial dan keindahan itu menjadi peluang ekonomi rakyat yang akhirnya dapat menjadi salah satu

sumber pendapatan daerah potensial selain tercitanya lapangan kerja baru.

- c. Infra struktur jalan-jalan daerah yang telah ditingkatkan kualitas fisiknya sejak beberapa tahun lalu melalui berbagai program pembangunan, kini mulai menumbuhkan dampak positif ekonomis yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas masyarakat untuk mengembangkan berbagai aktifitas ekonomi lokal dan kreatif. Dari situ muncul dan tumbuh pesat usaha-usaha restoran atau warung-warung makan yang dapat dijadikan sumber pendapat daerah melalui retribusi-retribusi yang sudah ada payung regulasinya, namun belum dilaksanakan.
  - d. Semakin meningkatnya aktifitas perekonomian dan transaksi di sejumlah wilayah Demak, meski masih dalam skala kecil memunculkan aktifitas jasa layanan parkir yang dikelola oleh masyarakat, mestinya hal ini tidak boleh lepas dari upaya eksekutif dalam memaksimalkan pendapatan daerah. Karena itu perlu ada langkah maksimalisasi pengelolaan parkir.
3. Besarnya Sisa Lebih Pembiayaan APBD ( SILPA) tahun 2018 yang mencapai Rp 200 Miliar lebih sungguh sangat memprihatinkan, ini sebuah ironi yang tentu tidak boleh terulang dimasa mendatang. Disaat sejumlah program strategis yang tertunda dan terkendala realisasinya dengan alasan minim atau ketiadaan anggaran, ternyata dalam kurun waktu tahun 2018 target penggunaan anggaran atas sejumlah aktifitas tidak terserap secara maksimal, karena itu fraksi kami menyarankan agar saudara

bupati lebih cermat dan jeli dalam menyusun perencanaan kegiatan di masa mendatang.

4. Sebagai catatan kritis dan evaluatif yang perlu segera ditindaklanjuti oleh saudara bupati saat ini adalah tidak segera ada tindakan nyata atas munculnya potensi penyakit masyarakat (pekat) yang muncul belakangan ini, yakni mulai maraknya aktifitas hiburan karaoke di sejumlah kawasan di Demak, padahal aktifitas itu dari sisi legalitas patut dipertanyakan. Dulu sebelum ada perda yang mengatur dan mengurus tentang hiburan saudara eksekutif terkesan menghindar ketika didesak masyarakat untuk mengambil tindakan penertiban. Sekarang ini instrument regulasinya berupa perda tentang itu sudah ada, kenapa tidak segera mengambil tindakan. Bukankah mencegah kemunkaran itu lebih baik dari pada mengatasinya, apalagi kalau pekat itu sudah akut.

**Saudara bupati, pimpinan ,anggota dewan dan hadirin yang berbahagia.**

Demikian pandangan umum fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Demak terhadap LPP APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2018 sikap kritis kami semoga dapat memicu kinerja saudara bupati di masa mendatang. Sehingga upaya untuk memanfaatkan potensi Demak dengan lebih maksimal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Demak dapat lekas terwujud.

Akhirnya kepada hadirin kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian pemandangan umum ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

**Salam Indonesia Raya !**

**Demak, 25 Juni 2019**

**Fraksi Gerindra**

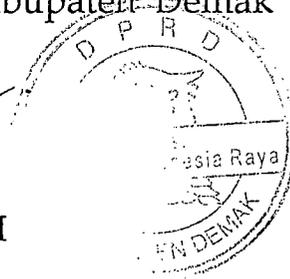
**DPRD Kabupaten Demak**

**Ketua**

**Sekretaris**

**H. Mu'thi Kholil SH**

**Danang Saputro, SH**





**PANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**  
**DPRD KABUPATEN DEMAK**  
**TERHADAP**  
**RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**SIDANG PARIPURNA DPRD KAB. DEMAK**  
**DEMAK, 25 JUNI 2019**

**PANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**  
**DPRD KABUPATEN DEMAK**  
**TERHADAP**  
**RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBD**  
**KABUPATEN DEMAK**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yth. Sdr. Wakil Bupati wakil Bupati,

Yth. Sdr. Ketua , Wakil Ketua , dan Seluruh Anggota Dewan,

Yth. FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak,

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan,

Yth. Sdr. Para Asisten dan Staf Ahli Bupati,

Yth. Sdr. Kepala Dinas, Badan,Instansi, Bagian, Sdr. Camat Se Kabupaten Demak, **Hadirin Sidang Paripurna yang berbahagia.**

Puji syukur kehadirat Allah SWT tentunya senantiasa kita panjatkan karena hanya oleh limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna Pemandangan Umum terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban APBD kabupaten Demak Tahun 2018

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhamad SAW dengan harapan semoga kita tetap mendapat syafaatnya sampai di hari akhir.

*Hadirin yang berbahagia,*

Sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban APBD kabupaten Demak Tahun 2018. perkenankan kami menyampaikan ucapan *Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H. "Mohon maaf lahir dan bathin"* Semoga Masih dipertemukan ramadhan dan idulfiri tahun depan.amin

*Sidang paripurna yang berbahagia,*

Sebagaimana Nota pengantar Bupati dalam penyerahan Raperda Peratnggungjawaaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2018 yang telah disampaikan dalam rapat dewan tanggal 19 juni 2019 yang lalu,kami perlu meyampaikan pendapat dan pandangan-pandangan demi penyempurnaan raperda yang dimaksud.”

*Sidang Paripurna yang berbahagia,*

Fraksi Golkar memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah kabupaten Demak ,Berdasar LHP BPK RI Atas LKPD Kabupaten Demak tahun 2018,Pemeriksa menyatakan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP ).

Namun demikianlah masih terdapat sejumlah temuan ,yaitu sejumlah kelemahan pada system pengendalian internal dan masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak patuh terhadap peraturan perundang undangan.

Oleh karena itu, Fraksi Partai Golongan Karya dapatlah memberikan pendapat, tanggapan, saran, dan pertanyaan, sbb.:

1. Dalam LHP BPK atas sistem pengendalian Internal LKPD 2018 terdapat temuan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tidak tertib Sebesar **Rp.53.999.344.450,00.** ( Lima Puluh tiga milyar Sembilan ratus sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) Permasalahan tersebut disebabkan tidak adanya SOP pemungutan retribusi dan pajak sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan daerah.  
**Mohon di jelaskan !** rincian lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk retribusi parkir baik di pertokban,pasar dan ditepi jalan.
2. Dalam pemungutan Pajak serta retribusi pertokoan,restoran warung makan.Fraksi golkar mendorong untuk system online.dengan tujuan mengantisipasi kebocoran pendapatan daerah.
3. Penatusahaan BMN di RSUD Sunan Kalijaga Menjadi Lemah Secara Administratif Sebesar **Rp.8.768.300.450,02 (Delapan Milyar Tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu empat ratus lima puluh nol 2 rupiah).** Permasalahan tersebut disebabkan Belum diketahui dengan pasti status BMN yang dikelola oleh RSUD Sunan Kalijaga. **Mohon di jelaskan !** Rincian BMN yang dimaksud serta yang sudah dilelang pada tahun 2018 dan yang akan dilelang pada tahun 2019.

4. Tidak kuatnya pengamanan hukum atas aset gedung dan bangunan milik pemkab Demak yang berdiri diatas lahan milik PT KAI Sebesar Rp. **1.692.094.731,00;** (*Satu milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah*) Resiko kehilangan aset yang tidak dilengkapi dengan pengamanan. Fraksi golkar memohon agar pemerintah Daerah tidak membangun atau mempergunakan anggaran belanja diatas lahan PT KAI,
5. Fraksi golkar mengusulkan untuk kantor kecamatan Demak untuk segera direlokasi ditanah milik Pemerintah Daerah.
6. **Mohon Penjelasan !** terkait Permasalahan yang sedang terjadi terkait TPI di Morodemak dan sistem Retribusi yang berlaku.
7. Fraksi Golkar mendorong Kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Realisasi Pencairan DD ( Dana Desa ) agar tepat waktu dan sesuai aturan serta tidak memperlambat pencairan di Desa wilayah Kabupaten Demak yang bisa menghambat pembagunan di desa serta pelaporannya.
8. **Mohon penjelasan !** terkait Dana DAK Di dinas Pendidikan dan kebudayaan yang belum terealisasi ditahun-tahun sebelumnya serta rincian rencana penggunaan Anggaran.
9. Untuk Penerangan jalan dan lampu taman diwilayah kabupaten Demak .Mohon diperhatikan untuk anggaran perawatannya digunakan sebaik-baiknya.

*Sdr. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Sidang, dan hadirin yang kami hormati,*

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban APBD kabupaten Demak Tahun 2018 . Kiranya apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kemajuan Demak tercinta.

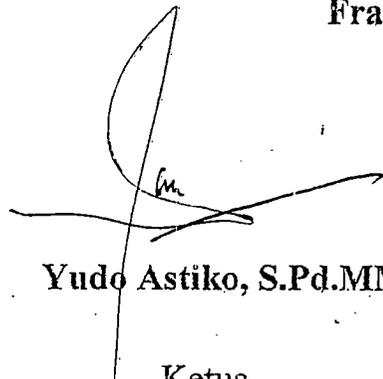
Sekian dan Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Demak, 25 Juni 2019**

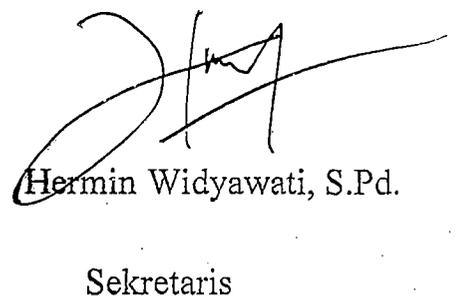
**Fraksi Partai Golongan Karya**

**DPRD Kab. Demak**



**Yudo Astiko, S.Pd.MM**

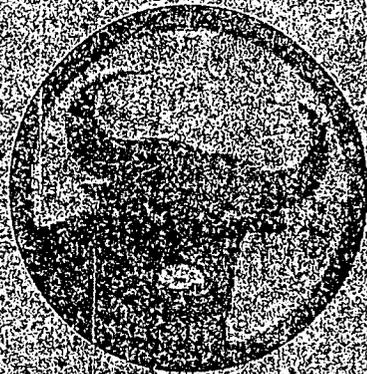
Ketua



**Hermin Widyawati, S.Pd.**

Sekretaris

**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI PDI PERJUANGAN  
DPRD KABUPATEN DEMAK**



**PDI PERJUANGAN**

**TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN  
ANGARAN 2018**

**PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK  
DEMAK, 25 JUNI 2019**

**PANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**  
**TENTANG**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN**  
**ANGGARAN 2018**

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Salam sejahtera bagi kita semua.

**Merdeka !!!**

Yang kami hormati. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Yang terhormat Sdr. Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD  
Kabupaten Demak;

Yth. Sdr. Unsur FORKOMPINDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak;

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan;

Yth. Sdr. Asisten Sekda, Kepala Bagian, OPD / Instansi di lingkungan  
pemerintah Kabupaten Demak;

Yth. Sdr. Camat Se-Kabupaten Demak;

Dan tamu Undangan serta Teman-teman Wartawan.

***Hadirin Peserta Rapat yang kami hormati;***

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (LPP APBD) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018. yang telah disampaikan oleh saudara Bupati Demak pada tanggal 19 Juni 2019.

Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allah humasholli'ala Muhammad*

*wa'alaalisyaidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat-Nya .Amien Yaa Robal'alamin.*

Sebelum Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan Pandangan Umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 perkenankan kami mengucapkan:

1. Khilaf & salah itu biasa, tapi meminta & memberi maaf itu luar biasa, Memaafkan tidak akan membuat kita hina, meminta maaf tidak meruntuhkan harga diri, saling memaafkan membuat kita mulia. Dibeningnya hati ada keruhnya prasangka, disantunnya sapa ada celanya kata, untuk itu *Fraksi PDI Perjuangan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H. Minal Aidzin wal Faidzin Mohon Maaf Lahir & Bathin.*
2. Semangat Pancasila adalah semangat persatuan dan kesatuan yang diaplikasikan dalam kehidupan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, mewujudkan Kemanusiaan yang adil dan beradab di seluruh sektor kehidupan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Lahir Pancasila 2019.
3. Apresiasi kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Demak atas hasil auditor BPK memberi opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hal ini berarti bahwa, selama tahun anggaran 2018 laporan keuangan yang diaudit telah menyajikan komponen/transaksi pemerintah daerah yang material **secara wajar**, dengan Kriteria, bahwa, Laporan keuangan sudah lengkap (LRA, LAK, Neraca, CAI K, LO dan SaL/K)

### ***Hadirin Peserta Rapat yang berbahagia;***

Pada dasarnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, merupakan perhitungan atas realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah selama satu tahun anggaran, dari laporan pertanggungjawaban ini

akan diketahui sejauhmana kinerja keuangan daerah dari suatu pemerintahan, struktur dan alokasinya, serta tingkat kesehatan keuangan pemerintah daerah.

Sebagai akhir tahun anggaran 2018, Bupati Demak secara resmi telah menyerahkan kepada DPRD Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2018, pada Rapat Paripurna tanggal 19 Juni 2019. Selanjutnya menjadi tugas Fraksi PDI Perjuangan untuk membahas dan menilai kinerja keuangan daerah tersebut, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD.

Bagi Fraksi PDI Perjuangan momen pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya, menjadi saat yang penting dan strategis, karena pertanggungjawaban keuangan merupakan wujud akuntabilitas publik dari seorang Kepala Daerah, yang menerima mandat dari masyarakat untuk mengelola keuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Juga untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan, rencana dan aturan-aturan yang telah digariskan.

Sebagai lembaga politik dan sekaligus representasi rakyat, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak dalam membahas dan menilai kinerja anggaran paling tidak menggunakan 5 (lima) indikator penganggaran daerah, yaitu;

1. **Efisiensi** anggaran; Apakah pembelanjaan anggaran benar-benar memperhitungkan nilai harga yang tepat sesuai kuantitas dan kualitas barang, jasa, dan modal yang diperlukan dalam penyelenggaraan program atau kegiatan pemerintahan daerah?
2. **Efektifitas** anggaran; Apakah anggaran yang dibelanjakan benar-benar mampu mencapai hasil yang ditargetkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan daerah?
3. **Ekonomisasi** anggaran; Apakah pengelolaan anggaran mampu mendorong perolehan barang dan jasa dengan penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas barang, jasa dan modal yang diperlukan?

4. **Keadilan** anggaran; Apakah alokasi atau distribusi anggaran telah diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan secara adil sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing?
5. **Hukum** anggaran; Apakah penganggaran daerah mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

Dari beberapa cacatan atas Pertanggungjawaban APBD berikut ini, merupakan hasil kajian singkat atas LPP APBD tahun 2018 yang didasarkan pada pengukuran ketercapaian atas tujuan umum laporan keuangan daerah, yaitu bagaimana menyajikan informasi mengenai **Posisi Keuangan, Realisasi Anggaran, Negera dan saldo anggaran lebih**. Oleh karena itu Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak seyogyanya memberikan masukan, catatan maupun pertanyaan sebagai berikut :

- 1, Untuk menghindari Potensi penyalahgunaan penerimaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang kurang tertib, perlu dilakukan SOP pemungutan retribusi dan pajak sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah
2. Dalam Pengelolaan Kas pada Pemerintah Kabupaten Demak agar dilakukan secara profesional, agar nantinya dapat memantau dan memastikan kebenaran sajian datanya.
3. Perlunya pemberdayaan anggaran pada OPD dalam belanja barang dan jasa dan melakukan tertib administrasi
4. Pada Pencatatan dan Pengelolaan Aset Tetap Pemkab Demak, perlu dilakukan tertib administrasi, sehingga data yang ada lebih informatif dan memudahkan dalam menelusuri keberadaan asetnya.
5. Perlu adanya Pengelolaan Dokumen Rumah Sub Inti yang Memadai, sehingga; dapat mencegah potensi timbulnya permasalahan hukum, sengketa, lahan Kepemilikan antara Pemkab Demak dengan penghuni Rumah Sub Inti dan mencegah adanya resiko kehilangan dan penyalahgunaan atas Aset Rumah Sub Inti di Kabupaten Demak tanpa prosedur yang sesuai ketentuan.

6. Terkait pengelolaan PAD dan observasi fisik secara uji petik pada Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diketahui terdapat permasalahan bahwa tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum kurang tertib. Sehingga dinas terkait perlu melakukan penagihan serta pengenaan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran piutang sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Identifikasi penyebab atas meningkatnya silpa tahun berjalan penting agar tidak terulang hal yang sama pada tahun selanjutnya, hal ini mengingat tahun 2019 – 2021 merupakan tahun pemantapan menuju percepatan program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi daerah, tentu diperlukan penyerapan anggaran yang maksimal agar target kinerja RPJMD di tahun tersebut terpenuhi.
8. Mohon penjelasan mengapa deposito kas daerah seluruhnya di tempatkan pada Bank Jateng ? Apa alasan yang mendasarinya?, sistem deposito apa yang dipilih? Serta berapa tingkat suku bunga yang disepakati pada bank tersebut ?
9. Apa masalah dan kendala dalam penyelesaian berbagai piutang tak tertagih tersebut? Kemudian Apa upaya pemerintah daerah selanjutnya dalam penyelesaian berbagai piutang tersebut?.
10. Pertumbuhan aset tetap Kabupater Demak tahun 2018 menurun drastis. jika tahun 2017 aset tetap dapat tumbuh 58,7% namun di tahun 2018 hanya mampu tumbuh 0,8%. Mohon penjelasan kepada pemerintah daerah apa yang menjadi penyebabnya ?
11. Atas penurunan proporsi belanja modal pada 2 tahun terakhir ini (2017 dan 2018), apakah memang infrastruktur Demak sudah selesai (cukup tersedia) dan terstandarisasi sehingga belanja modal menurun di tahun 2017 dan tahun 2018?.

**Hadirin Peserta Rapat yang berbahagia;**

Demikian pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak yang dapat kami sampaikan, dengan harapan mendapat perhatian dan tanggapan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Amien. Terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Merdeka !!!**

Demak, 25 Juni 2019

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**

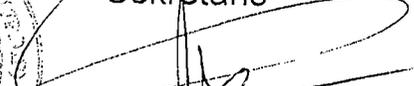
Ketua



H. SUGIHARNO, SP



Sekretaris



H. FAOZAN SH.

**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA (FKB)  
DPRD KABUPATEN DEMAK**



**TERHADAP  
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DAN  
PELAKSANAAN APBD DAERAH KABUPATEN  
DEMAK TAHUN ANGGARAN 2018  
PADA SIDANG PARIPURNA DPRD KAB. DEMAK  
TAHUN 2019**



PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DPRD KABUPATEN DEMAK  
TERHADAP  
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DAN  
PELAKSANAAN APBD DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN  
ANGGARAN 2018  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

---

Assalamualaikum wr. wb.

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيدنا محمد أما بعد:-

Kepada ;

Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak

Yth. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota  
DPRD Kabupaten Demak.

Yth. Saudara Unsur Muspida Kabupaten Demak

Yth. Saudara Ketua Pengadilan Negeri Kab. Demak

Yth. Saudara Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Demak

Yth. Ketua Kejaksaan Negeri Kabupaten Demak.

Yth. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.

Yth. Saudara staf Ahli Bupati dan asisten sekda Kab. Demak.

Yth. Saudara SKPD di lingkungan Pemerintahan Kab. Demak

**Yth. Saudara FORKOPIMCAM se-Kabupaten Demak, dan**  
**Yth. Para undangan dan teman insan pers yang berbahagia**

**Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang berbahagia**

Mengawali Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa, marilah terlebih dahulu bersama-sama kita Panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini masih dapat mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Demak

Selanjutnya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan Syafaatnya.

Terimakasih kami sampaikan kepada Pimpinan sidang, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa, pada Sidang paripurna siang hari ini.

Selanjutnya Setelah kami baca nota Pengantar Bupati dalam rangka Penyerahan Laporan Pertanggung jawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018.

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dan dari hasil mencermati fakta di lapangan sehingga fraksi kebangkitan bangsa melalau hasil rapat akhirnya di tuangkan di dalam Pemandangan umum sebagaimana akan kami sampaikan pada siang hari ini.

Fraksi Kebangkitan Bangsa ( FKB ) DPRD Kabupaten Demak menyampaikan beberapa hal pendapat, saran, masukan serta pertanyaan dalam Sidang Paripurna DPRD Demak sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018 yang terdiri atas;

**1. Pendapatan : Rp. 2.143.306.258.595,00**

***Terbilang ( Dua Triliyun Seratus Empat Puluh Tiga Milyar tiga ratus Enam Juta Dua Ratus Lima puluh Delapan Ribu Lima ratus sembilan puluh lima rupiah)***

2. Belanja : Rp. 2.050.065.954.050,00,-

*Terbilang ( Dua triliyun Lima Puluh Milyar Enam Puluh Lima Juta Sembilan ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Puluh Rupiah )*

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 27 (2) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah  
Bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah , dan memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan kepada Masyarakat, serta Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang selanjutnya melalui amandemen menjadi Undang-undang No.09 tahun 2015, serta mengacu Undang-undang No. 17 tentang Keuangan Negara.

Dengan ini ada beberapa cacatan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa terhadap Laporan Pertanggung jawaban Saudara Bupati Demak;

1. Terkait dengan pendapatan sektor PAD ( Pendapatan Asli Daerah ) Kab. Demak sangat minim bila di banding dengan Daerah-daerah lain, maka perlunya Pemerintah Kab. Demak untuk meningkat sektor tersebut dengan membuka usaha-usaha Daerah baik dengan membentuk BUMD.

Dalam rangka mendorong Pembangunan Daerah, salah satunya Pendirian BUMD ( Badan Usaha Milik Daerah ) tentu peranannya sangat di nanti oleh Publik Demak, alasannya adalah ;

- Pendapatan sumbangan bagi retribusi Daerah,
- Pendapatan Daerah dari Pajak,
- Pendapatan dari dividen, dan
- Privatisasi.

Yang kesemuanya merupakan penyumbang bagi pendapatan Daerah Kabupaten Demak.

dan PAD yang lain yang Syah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Mengenai pekerjaan umum pembangunan inpra struktur Jalan dan Jembatan sampai tahun 2018 terus mengalami kemajuan dan hampir mayoritas baik namun

yang perlu di tingkatkan penanganan irigasi dan sungai-sungai harus betul-betul di perhatikan terutama di zona rawan banjir baik banjir di karenakan Abrasi dan Banjir karena Dampak Curah hujan yang tinggi, dengan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, begitu pula Banjir abrasi di Zona pesisir sejauh ini sangat minim perhatian, bagaimana perekonomiannya, tempat pemukimannya, Kesehatannya, pendidikannya pada masyarakat pesisir ini yang harus di perhatikan oleh pemerintah Daerah, mohon ini betul-betul di perhatikan.

3. Terkait mengenai belanja Hibah dan bantuan Sosial yang masih kurang jelas realisasinya karena program ini sangat di butuhkan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memajukan Pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat terutama masyarakat yang membutuhkan uluran kebijakan dari Kepala daerah, ini merupakan amanat Undang-undang.
4. Yang terakhir dalam Pemandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa menyampaikan selamat atas predikat WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian ) dalam

pemeriksaan lembaga Keuangan Negara yaitu BPK pada tahun anggaran 2018, serta harus di pertahankan untuk tahun-tahun anggaran berikutnya Pemerintahan Demak harus bersih dan berwibawa dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

### **Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang berbahagia**

Demikian Pemandangan umum dari Fraksi Kebangkitan Bangsa terhadap Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018.

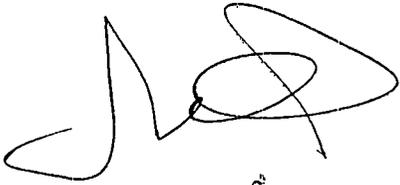
telah kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dengan harapan masukan dari kami betul-betul di perhatikan dan dilaksanakan oleh Bupati sampai pada jajaranya demi cita-cita bersama.

Akhirnya, semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan kekuatan untuk mengemban amanahNya. Amien...

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Demak, 25 Juni 2019

**FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA  
DPRD KABUPATEN DEMAK**



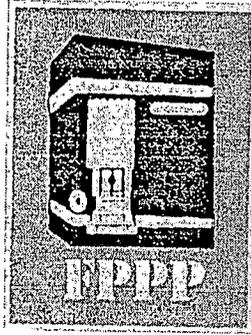
**H. GHOZALY, S.Pd.I**

Ketua



**NUR FADLAN, S.Ag**

Sekretaris



PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DPRD KABUPATEN DEMAK  
TERHADAP  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2018

\*\*\*

SELASA ,25 JUNI 2019

**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DPRD KABUPATEN DEMAK  
TERHADAP  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2018**

---

Assalamualaikum wr. wb.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی اِمَامِ الْاَنْبِیَا -  
وَالْمُرْسَلِیْنَ ، سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَمَنْ -  
تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ ، اَمَّا بَعْدُ :-

Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak

Yth. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak

Yth. Saudara Anggota Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri  
Demak

Yth. Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan

Yth. Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Dinas, Instansi, Bagian dan para Camat se- Kabupaten Demak.

Segenap Undangan dan hadirin yang kami hormati.

Dalam kesempatan yang baik ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rohmat, taufiq dan hidayah Nya, sehingga pada hari ini, Selasa ,25 Juni 2019 kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018.

Sholawat dan Salam, senantiasa kita sampaikan kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Rosul yang mulia, yang menyampaikan kebenaran, menuju keselamatan Umat manusia didunia dan diakhirah. Semoga kita mendapat syafa'atnya, Aamiin.

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Ketua Dewan selaku Pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan kepada kami, guna menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap LPP APBD Kab, Demak Tahun 2018.

Hadirin Rapat Dewan yang Kami hormati,

Bahwa Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 beserta Perubahan-Perubahannya adalah melaksanakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 ,dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan juga Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 telah di ubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 ,di Konversi dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Kepala Daerah berkewajiban Menyampaikan Rancangan LPP APBD kepada DPRD Paling lambat 6(enam) Bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Laporan tersebut di sampaikan setelah di periksa oleh BPK.

Hadirin Rapat Dewan yang kami hormati,

Fraksi PPP DPRD Kabupaten Demak menyampaikan beberapa hal pendapat, saran, masukan serta pertanyaan tentang Ranperda tersebut sebagai berikut :

1. Fraksi PPP DPRD Kabupaten Demak menyampaikan Apresiasi yang setinggi –tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Demak atas tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terhadap LPP APBD Kabupaten Demak Tahun 2018 .

Adapun Prestasi tersebut harus bisa di pertahankan untuk tahun berikutnya dengan tidak meninggalkan permasalahan – permasalahan .

2. Berkaitan dengan target pemerintah Kab. Demak mengenai APBD Tahun 2018 adalah Pendapatan terealisasi sebesar Rp.2.143.306.258.595

Adapun Belanja APBD 2018 Kabupaten Demak terserap atau terealisasi sebesar Rp.2.050.065.954.050,- sehingga Silpa masih sangat besar yaitu Rp.200.338.226.291,- . Hal ini kenapa sebabnya apakah karena perencanaannya yang tidak baik atau sebab apa Mohon Penjelasan ?

3. Belanja Hibah kepada Masyarakat untuk APBD Tahun 2018 masih

Sangat minim termasuk juga untuk sekolah –sekolah swasta Ponpes, Madin dan lainnya kami berpendat bahwa seharusnya pemerintah kabupaten membuat kebijakan daerah untuk hal tersebut sehingga APBD memenuhi unsur keadilan,dan hibah dan bansos di APBD 2019 ini harus di tata dengan baik sehingga bisa terealisasi dan tertib Mohon penjelasan ?

4. Terhadap temuan BPK RI yaitu penganggaran belanja modal yang di hibahkan/di serahkan kepada kelompok masyarakat Desa sebesar Rp.97.488.159.126,- tidak tepat dan mikanisme pengelolaannya tidak tertib yaitu pada Dinas PU dan Penataan Ruang merealisasikan belanja modal masing-masing sebesar Rp.487.707.000. dan Rp.97.000.452.126,- untuk infrastruktur Desa seharusnya dianggarkan dan di realisasikan dalam belanja barang dan jasa dan sesuai ketentuan seharusnya di sertai proposal,sebanyak 661 paket tidak ada proposalnya ,terhadap hal ini Mohon penjelasan?

5. Pengendalian pengelolaan persediaan pada 13 (tiga belas) OPD tidak tertib oleh penilaian BPK RI Mohon penjelasan?
6. Berkaitan Bantuan hibah dan bansos di nilai tidak tertib di karenakan laporan pertanggung jawaban pelaksanaannya . seharusnya ini tidak terjadi dan fungsi perencanaan ,koordinasi,sosialisasi harus bisa berjalan dengan baik mohon Penjelasan?
7. Masih ada permasalahan pencatatan dan pengelolaan aset tetap Pemkab Demak tidak tertib sebesar Rp.10.460.395.181,02 terhadap hal ini mohon penjelasan dan bagaimana komitmen pemerintah terhadap pengelolaan Aset di kabupaten Demak termasuk tindak lanjut Rekomendasi BPK RI terkait pengelolaan Aset sebelumnya atas scedhuling persertifikatan tanah milik Pemkab Demak. Mohon penjelasan ?
8. Fraksi PPP DPRD Kabupaten Demak menyarankan Agar Pemerintah memaksimalkan realisasi atau pelaksanaan Perda – Perda di Kabupaten Demak dengan baik sehingga target jangka pendek maupun menengah bisa tercapai dengan baik sebagaimana

Visi –Misi Kabupaten Demak. Dan Demak sebagai Kota Wali tetap terjaga dengan baik juga semakin maju.

Hadirin Rapat Dewan yang kami hormati.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun 2018, Kemudian untuk di tindak lanjuti dalam tahapan Rapat berikutnya. kemudian apabila ada kehilafan dan kesalahan mohon ma'af yang sebesar-besarnya, atas perhatian dan kerjasama semua pihak kami sampaikan terima kasih, semoga Demak semakin maju, aman, kondusif, bersih dan tertib dibawah lindungan Allah SWT, Aamiin.

Walloohul muwaafiq ilaa aqwamith thoriiq

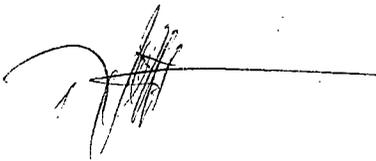
Wassalamualaikum wr. wb.

Demak, 25 Juni 2019

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

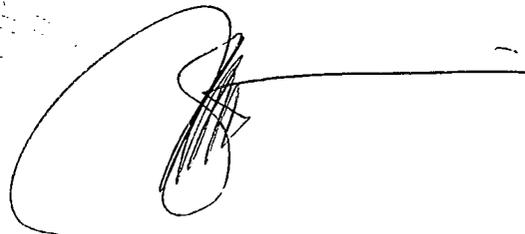
**DPRD KABUPATEN DEMAK**

**KETUA**



( ABU SAID, S.Pd.I )

**SEKRETARIS**



( H. ROZIKHAN ANWAR, SH )

**PEMANDANGAN UMUM**

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN  
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2018**



**PADA RAPAT PARIPURNA DPRD  
KABUPATEN DEMAK**

**SELASA 25 JUNI 2019**

## **PANDANGAN UMUM**

### **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Yth. Saudara Ketua Pimpinan DPRD serta rekan –rekan anggota  
DPRD Demak

Yth. Sdr. Bupati dan Wk Bupati Demak

Yth. Sdr Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan beserta para  
kepala dinas dan segenap jajaran eksekutif

Yth. Unsur Pimpinan Forkompimda Kab. Demak

Yth. Pimpinan Pengadilan Negeri dan pengadilan pengadilan  
Demak

Yth. Para Camat, rekan pers, tamu undangan dan seluruh hadirin  
yang berbahagia

*Alhamdulillah*, Segala puji bagi Allah *Azza wa Jalla*, atas berkat rahmat dan nikmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten Demak tahun 2018. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *uswah hasanah* kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, semoga kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaatnya Amin.

Kepada pimpinan DPRD kabupaten Demak, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk membacakan pemandangan umum fraksi .

Didalam suasana yang bulan syawal ini perkenankan kami dari FPKS ucapkan “*Taqabbalallaahu minnaa wa minkum taqabbal yaa kariim, wa ja'alanaallahu waiyyaakum minal 'aaidin wal faaiziin wal maqbuulin kullu 'ammin wa antum bi khair*”. Semoga Allah menerima (amal ibadah Ramadhan) kami dan kamu. Wahai Allah yang Maha Mulia, terimalah dan semoga Allah menjadikan kami dan kamu termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang menang serta diterima (amal ibadah) setiap tahun, semoga kamu senantiasa dalam kebaikan.

## **Sidang dewan yang terhormat,**

Berkaitan dengan Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun 2018, Fraksi PKS menyampaikan pandangan umumnya dalam catatan, pertanyaan dan saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan LHP BPK tahun 2018 terdapat catatan sebanyak 666 paket pekerjaan, namun hanya ada 5 proposal yang tertulis lengkap sedangkan sisanya 661 paket pekerjaan tidak memiliki proposal. Mengapa demikian?
2. Terhadap pengelolaan persediaan pada 13 OPD disebut tidak tertip dalam mengadministrasikan buku persediaan, buku barang investaris, buku barang habis pakai, buku hasil pengadaan, kartu barang dan surat perintah penyaluran barang (SPPB). Untuk itu kami FPKS meminta komitmennya untuk diwaktu yang akan datang dapat lebih baik.
3. Terhadap PAD di sektor parkir, FPKS mengharap terdapat perluasan titik-titik objek parkir yang ditempat-tempat (ruas) tertentu sudah semakin ramai, tapi belum menjadi objek parkir resmi. Untuk menjamin kenyamanan pengguna dan menghindari “bentrok” pihak yang memanfaatkan, kami harap ruas/tempat tersebut diresmikan menjadi objek PAD parkir daerah.

4. Terkait tarif parkir yang berlaku dilapangan nilainya sudah dua kali lipat dari harga resmi, FPKS menanyakan apakah perlu dikaji kembali terkait tarif tersebut?
5. Pada 3 OPD yaitu Dindakop, Dinputaru, RSUD Sunan Kalijaga terdapat volume pekerjaan yang kurang dan dianggap terdapat kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan, mohon penjelasan pekerjaan apa saja?
6. Terdapat Silpa tahun berjalan Rp. 200.338.226.291 yang masih yang masih cukup besar, FPKS mohon penjelasan tentang Silpa tersebut diantaranya:
  - Program yang tidak bisa terserap apa saja jelaskan?
  - BOS, DAK, sertifikasi guru dan lainya berapa jumlahnya?

**Sidang dewan yang terhormat,**

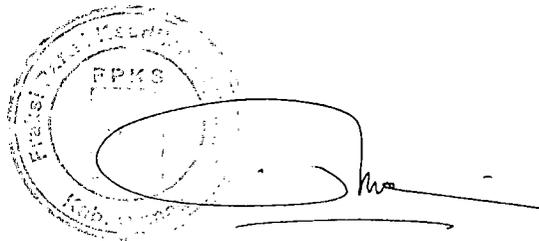
Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi PKS DPRD Kabupaten Demak terhadap Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak 2018 ini kami sampaikan. Semoga Pemerintah kabupaten Demak dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dan masukan kami diatas.

*Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh*

Demak, 25 Juni 2019  
FRAKSI PKS  
Kabupaten Demak.

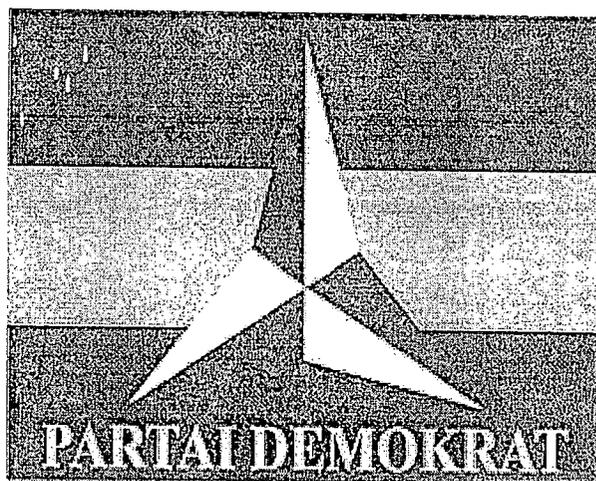


**Kamzawi S, Ag**  
Ketua



**Zamroni S.Sos**  
Sekretaris

**PANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI AMANAT DEMOKRASI**  
**ATAS**  
**LPP APBD KABUPATEN DEMAK**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**



**DEMAK, 25 JUNI 2019**

Assalamu'laikum Wr. Wb

- Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak
  - Yang kami hormati Ketua, Wakil ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Demak
  - Yang kami hormati FORKOMPINDA, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Demak atau yang mewakili.
  - Yang kami hormati Sekda dan Sekwan Kabupaten Demak
  - Yang kami hormati Staf Ahli Bupati dan para Asisten Sekda Kabupaten Demak
  - Yang kami hormati Kepala Dinas, Badan, dan Instansi sekabupaten Demak
  - Yang kami hormati Camat sekabupaten Demak
  - Yang kami hormati Tamu undangan dan teman-teman mass media baik cetak maupun elektronika di Kab. Demak
- Untuk mengawali pandangan umum ini, maka terlebih dahulu kita panjatkan Puja dan Puji kepada Allah SWT, Tuhan penguasa alam semesta dimana sampai saat ini kita masih menerima Taufik dan Hidayah-NYA sehingga kita masih dapat menghadiri Rapat Paripurna Pagi ini.
- Sholatullah wa salamullah semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang Insya Allah dengan Ridha Allah besok akan memberi syafaat kepada kita semua, Amin.

- Selanjutnya kami ucapkan Terimakasih kepada Pimpinan Rapat yang sudah memberi waktu kepada Fraksi Amanat Demokrasi untuk menyampaikan Pandangan Umum, atas LPP APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018

Pimpinan Sidang, Bupati dan Wakil Bupati Yang berbahagia....

Adalah kewajiban seorang Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan, enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU no 17 Tahun 2003 juga UU No 9 tahun 2015. Laporan keuangan tersebut disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan untuk yang kesekian kalinya Fraksi Amanat Demokrasi mengapresiasi kepada jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Demak karena telah dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP dari BPK) selama tiga kali berturut-turut.

Hadirin yang berbahagia....

Pada nota pengantar Saudara Bupati pada tanggal 19 Juni 2019 pada pos belanja daerah Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2018 menganggarkan dana sebesar Rp. 1.855.849.008.777 (satu trilyun delapan ratus lima puluh lima

milyar delapan ratus empat puluh Sembilan juta delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan hanya terealisasi sebesar Rp. 1.702.389.136.934 (satu trilyun tujuh ratus dua milyar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari :

- Belanja OP
- Belanja modal
- Belanja tidak terduga

**Pertanyaan kami adalah mengapa target yang sudah direncanakan tersebut tidak bisa tercapai?**

**Faktor – faktor apa yang mempengaruhi?**

Di dalam ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 pada pos belanja pegawai 2.1.1 Anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 793.627.849.857 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 722.431.040.458 Sisa lebih anggaran belanja Pegawai Rp. 71.196.809.399

**Hal ini menandakan OPD-OPD tidak cermat dalam penyusunan anggaran.**

**Kenapa hal ini bisa terjadi?**

Pimpinan Sidang, Bupati dan Wakil Bupati Yang berbahagia....

Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga dalam menggunakan anggaran APBD terdapat anggaran belanja pegawai Rp. 21.250.000.000, terealisasi Rp. 20.709.055.729. sedang di anggaran lain dengan kode rekening 1.02.1.02.0202.33.01.5.2.1 terdapat belanja pegawai sebesar Rp. 41.879.481.099, yang terealisasi Rp. 39.990.697.659 (44%) dari Pendapatan BULD RSU Sunan Kalijaga

- **Pertanyaannya kenapa ada belanja pegawai dobel di RS Umum Daerah Sunan Kalijaga Demak?**

**Mohon Penjelasan.**

- **Kenapa Di RSU Sunan Kalijaga ada piutang sebesar Rp. 30.748.895.000.**

**Mohon Penjelasan.**

Terkait dengan pembangunan terminal Induk Tipe A di Kabupaten Demak, kami melihat tidak ada keseriusan dari Pemerintah Kabupaten Demak, karena sampai enam kali pergantian Kepala Dinas Perhubungan, Induk Bangunan pun belum ada.

Kapan terminal Tipe A tersebut bias diwujudkan? Mengingat sudah banyak anggaran yang dikeluarkan untuk rencana tersebut.

Pimpinan Sidang, Bupati dan Wakil Bupati Yang berbahagia....

Berkaitan dengan maksud dan tujuan penyusunan Laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat Demak untuk bukti transparansi dalam menjalankan APBD, namun dalam kenyataannya **Buku Rancangan Peraturan Bupati Demak** tentang LKPD yang diserahkan Kepada DPRD pada tanggal 19 Juni 2019 masih banyak kekurangan, Ini terbukti dari **lampiran petunjuk halaman** yang tidak lengkap dan acak. Begitu juga ada 122 halaman yang hilang, dari halaman 388 sampai halaman 510

**Kenapa hal ini terjadi?**

**Mohon penjelasan !!**

Realisasi Pendapatan Penjualan Air PDAM Tirta Dharma Demak di tahun 2018 ini naik signifikan. dari Rp. 27.590.000.000 (tahun 2017) menjadi Rp. 37.230.276.000 (tahun 2018) atau naik sekitar 34%. Ini masih menggunakan system manual.

**Kapan PDAM Tirta Dharma Demak menerapkan system online? Karena dengan system online akan mengurangi resiko kecurangan dalam pembayaran.**

Setelah UPTD PHP (Pengolahan Hasil Pertanian) yang menangani LDM di Kecamatan Dempet dihapus, lalu siapakah yang akan menangani LDM tersebut? Padahal di LDM ada beban PAD sebesar Rp. 419.000.000.

Mohon Penjelasan !

Pembangunan Pasar daerah yang terletak di Bango Kecamatan Demak yang menggunakan dana TP tahun 2018 sudah selesai. Begitu juga bangunan pasar Mranggen di Kecamatan Mranggen juga sudah selesai.

Kapankah Pemkab Demak akan menyerahkan atau membagikan kios dan los kepada pedagang?

Mohon penjelasan!

## **SARAN-SARAN**

Kita semua warga Demak telah tahu bahwa usaha pertanian dan perkebunan merupakan pekerjaan utama, namun petani di Demak belum mempunyai lahan atau tempat untuk latihan, dan pembelajaran.

Fraksi Amanat Demokrasi menyarankan kepada Bupati untuk lahan Pertanian milik Pemkab yang ada di Desa Kaliyantar Kecamatan Wonosalam yang seluas enam hektar agar sebagian dapat digunakan untuk lahan pelatihan atau percontohan tentang pertanian. Agar petani di Demak bisa mengembangkan inovasi dan edukasi pertanian di lahan tersebut.

Demikian Pandangan Umum dari Fraksi Amanat Demokrasi atas LPP APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah

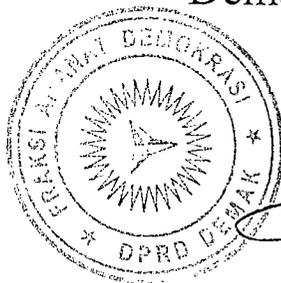
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Demak, 25 Juni 2019

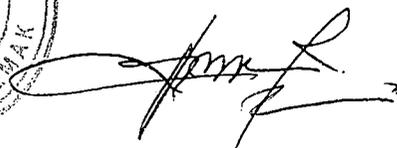
Ketua



Fatkhan, S.H.



Sekretaris



H. Farodli, S.Pdi